

Kritik Boaventura de Sousa Santos terhadap Ideologi Pembangunan: Sebuah *Epistemicide*

Leonardus Aditya Krisnadi¹

¹ Departemen Filsafat, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: leonardusbonavent@gmail.com¹

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license.</i> <i>Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 24-03-2023	Direview: 28-03-2023	Publikasi: 30-09-2023

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kritik terhadap ideologi pembangunan dengan menggunakan perspektif teori *epistemicide* Boaventura de Sousa Santos. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika filsafat. Konsep *epistemicide* Boaventura de Sousa Santos membongkar sejarah panjang dominasi epistemologi Barat terhadap epistemologi *non*-Barat. *Epistemicide* yang dibawa dalam kolonialisme dan imperialisme membunuh pengetahuan lokal untuk menciptakan dominasi epistemologi Barat. Hari ini praktik *epistemicide* kembali terjadi untuk membenarkan proyek ideologi pembangunan, negara berkembang diarahkan untuk mengikuti panduan untuk mencapai tahap masyarakat modern seperti peradaban Barat. Ideologi pembangunan menjadi bentuk dominasi baru Barat terhadap negara berkembang dengan cara menyingkirkan pengetahuan lokal. Pada akhirnya, hilangnya pengetahuan lokal akan menghasilkan hilangnya kendali masyarakat lokal terhadap masa depan bangsa mereka. Untuk melampaui dampak dari *epistemicide*, Santos menawarkan dua prosedur, yaitu ekologi pengetahuan dan penerjemahan lintas budaya. Kedua prosedur ini mendorong terwujudnya epistemologi alternatif yang berdasar pada pengakuan akan dominasi dan mendorong penghargaan pada keberagaman pengetahuan.

Kata Kunci: epistemologi sosial; epistemicide; ideologi pembangunan

Abstract

This study aims to explain criticism of developmentalism with Boaventura de Sousa Santos' epistemicide theory. This study used the philosophy hermeneutic method. Boaventura de Sousa Santos' epistemicide theory exposed the long history of Western epistemology's domination over non-Western epistemologies. In the past, colonialism and imperialism used epistemicide to murder local knowledge in order to create Western epistemological supremacy. Today, epistemicide is used to justify developmentalism, where developing countries are directed to follow certain guidelines to reach modernity like Western civilization. Developmentalism has become a new form of Western domination over developing countries by eliminating local knowledge. In the end, the loss of knowledge will be contributed to the loss of local people's control over the future of their nation. To overcome the impact of epistemicide, Santos offers 2 procedures: the ecology of knowledge and intercultural translation. Both of these procedures encourage the realization of an alternative epistemology based on recognition of domination and encourage respect for the epistemology diversity.

Keywords: social epistemology; epistemicide; developmentalism

1. Pendahuluan

Ideologi pembangunan menjadi salah satu ideologi dominan di dunia pasca Perang Dunia II. Dominasi ideologi pembangunan tidak terlepas dari teori modernisasi yang terus dipromosikan sebagai cara mendorong kemajuan bagi negara berkembang (Dirlik, 2014). Teori modernisasi pada dasarnya bertumpu pada pandangan evolusioner atas perkembangan ekonomi dan modernisasi merupakan proses bertahap menuju satu dunia yang sama, yakni kapitalisme yang tersusun atas individu-individu dengan kebebasan dan inisiatifnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas kehidupannya (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Maka, untuk mewujudkan pembangunan, masyarakat tradisional harus mengalami perubahan menjadi masyarakat modern

(Abdoellah & Mulyanto, 2019). Proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern pada akhirnya akan berdampak pada pelestarian pengetahuan atau kearifan lokal masyarakat.

Bagi pendukung modernisasi, kearifan lokal seringkali diasosiasikan sebagai bentuk hambatan bagi kemajuan. Maka, untuk melampaui hambatan, kearifan lokal harus digantikan dengan pengetahuan yang lebih rasional. Proses rasionalisasi kehidupan sosial masyarakat dipandang akan membebaskan masyarakat dari keterkungkungan secara kultural (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Pandangan ini didukung oleh pandangan Max Weber yang memandang bahwa manusia tidak boleh terjebak dalam kemalasan dan harus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Bagi pendukung modernisasi dan pembangunan, kemajuan menjadi justifikasi untuk menggusur kearifan lokal yang dipandang sebagai penghambat kemajuan peradaban. Penggusuran kearifan lokal akan mencabut masyarakat dari kehidupan mereka dan menciptakan ketergantungan pada hegemoni ideologi pembangunan.

Proses penggusuran kehidupan dan pengetahuan masyarakat tradisional memicu permasalahan epistemis yang melanggengkan hegemoni ideologi pembangunan. Teori *epistemicide*, Boaventura de Sousa Santos menjelaskan *epistemicide* sebagai pembunuhan pengetahuan, artinya ketimpangan relasi antar peradaban akan menyebabkan kematian pengetahuan kelompok subordinat, bahkan kematian bagi masyarakat tersebut (Santos, 2016). Santos menggunakan *epistemicide* sebagai kritik terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme Eropa yang menciptakan penggusuran pengetahuan lokal dan menciptakan dominasi pengetahuan Eropa. Lebih lanjut Santos menjelaskan bahwa *epistemicide* dalam ekspansi Eropa menjadi salah satu kondisi dari genosida (Santos, 2016).

Epistemicide terjadi ketika ada penindasan terstruktur pada suatu cara berpengetahuan yang diwujudkan dalam praktik ketidakadilan epistemis (Patin dkk, 2021). Dampak dari *epistemicide* adalah terciptanya hegemoni pengetahuan Barat yang dipandang sebagai pengetahuan yang mapan. Hegemoni pengetahuan Barat menunjukkan adanya *epistemological privilege* yang dicapai dengan cara menghancurkan pengetahuan alternatif yang mungkin mempertanyakan keistimewaan pengetahuan Barat (Santos, 2016). Penghancuran pengetahuan selalu berkaitan dengan penghancuran kehidupan masyarakat, maka *epistemicide* selalu memiliki kaitan erat dengan ketidakadilan epistemis.

Dominasi ideologi pembangunan dan cita-cita modernisasi dewasa ini telah menciptakan ketergantungan negara berkembang pada negara barat. Ketergantungan bantuan ekonomi dan dukungan teknologi menjadi upaya negara berkembang untuk mendorong kemajuan guna mencapai peradaban modern layaknya peradaban Barat. Namun, dalam proses modernisasi ini terdapat ongkos pembangunan yang tidak dapat diabaikan yaitu penggusuran kearifan lokal atas nama kemajuan. Kearifan lokal yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat kini dipandang sebagai hambatan bagi kemajuan yang harus ditinggalkan. Proses penggusuran kearifan lokal atas nama kemajuan ini memiliki dampak pada kehidupan masyarakat tradisional. Maka, dalam penelitian ini, peneliti mencoba membahas kritik terhadap ideologi pembangunan dengan menggunakan perspektif teori *epistemicide* Boaventura de Sousa Santos.

2. Metode

Penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode hermeneutika filsafat. Penyusunan penelitian ini bersifat kualitatif model penelitian mengenai masalah aktual (Bakker & Zubair, 1994). Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan unsur metodis sebagai berikut (Bakker & Zubair, 1994): deskripsi, kesinambungan historis, dan refleksi kritis.

3. Pembahasan

a. Teori Ideologi Pembangunan

Ideologi pembangunan dewasa ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses mengubah alam dan dunia sosial-ekonomi yang memungkinkan orang untuk mencapai potensi-potensi kemanusiaannya melalui sarana-sarana ekonomi-politik (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Definisi ini menampilkan pembangunan sebagai sebuah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sumber daya alam dan sarana eksploitasinya yang memang dirancang untuk sebesar mungkin mengambil dari alam (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Proses konversi yang dilakukan pembangunan yang merubah sumber daya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi memiliki persoalan yang menghasilkan suatu pertanyaan: apakah pembangunan menghasilkan kesejahteraan atau justru melanggengkan eksploitasi pada alam dan masyarakat subordinat?

Ideologi pembangunan dapat diartikan sebagai ideologi yang mengagungkan pembangunan sebagai sebuah kekuatan yang membawa kesejahteraan dan membebaskan dari kemiskinan (Dirlik, 2014). Sebagai ideologi dominan, ideologi pembangunan muncul dari pengaruh teori modernisasi. Gagasan modernisasi seringkali dipandang lebih netral dibandingkan dengan westernisasi, meskipun gagasan modernisasi masih dikaitkan dengan semangat untuk meniru peradaban Barat yang modern. Individu yang dipandang modern adalah pribadi yang memiliki karakter yang mengandalkan diri sendiri dan berorientasi pada prestasi (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Karakter ideal dari individu modern adalah syarat penting bagi transformasi masyarakat menuju modernisasi. Orientasi pada prestasi dipandang harus dihidupi sebagai mentalitas untuk mendorong semangat modernisasi masyarakat (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Untuk menuju masyarakat modern, dibutuhkan perubahan dengan cara meninggalkan karakter tradisional.

Untuk bisa merdeka dari hambatan kultural, Max Weber memandang masyarakat tradisional harus melalui proses rasionalisasi kehidupan sosial mereka (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Proses rasionalisasi ini akan membentuk pribadi yang lebih individualis yang mengedepankan upaya untuk bekerja keras dan tidak terjebak dalam kemiskinan, individu tersebut akan dipandang sebagai pribadi yang malas dan tidak mau bekerja keras (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Lewat pandangan rasionalisasi ini, pembangunan pada negara berkembang dipandang tidak cukup hanya lewat bantuan ekonomi dan teknologi, melainkan pembangunan hanya akan berhasil apabila masyarakat tradisional meninggalkan budaya tradisional mereka dan menjadi masyarakat yang lebih modern (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Salah satu teori tentang perkembangan ekonomi masyarakat dijelaskan oleh Walt Whitman Rostow (1960) sebagaimana dikutip oleh Abdoellah dan Mulyanto (2019) sebagai berikut.

1) Tahap 1: masyarakat pada kondisi tradisional

Pada tahap pertama, masyarakat masih hidup tradisional dengan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pertanian subsistensi. Dalam tahapan ini terdapat halangan kultural yang sangat kuat terhadap pembangunan, hal ini ditandai dengan minimnya akses pada teknologi industri modern. Untuk bisa berkembang ke tahap kedua, maka diperlukan bantuan teknologi dan investasi dari negara maju.

2) Tahap 2: masyarakat pada tahap prakondisi tinggal landas

Pada tahap kedua, masyarakat mulai mendapatkan paket-paket bantuan dari negara maju yang membawa keahlian Barat dalam masyarakat tradisional. Proses dalam tahap ini didominasi pada transfer teknologi, investasi infrastruktur dan pengembangan keterampilan masyarakat.

3) Tahap 3: masyarakat pada tahap tinggal landas

Pada tahap ketiga atau tahap tinggal landas, masyarakat mulai mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi norma yang meresapi aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat mulai bergerak melampaui perekonomian subsistensi dan menuju pada proses produksi yang mendorong tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

4) Tahap 4: masyarakat pada proses menuju kedewasaan ekonomi

Pada tahap keempat, masyarakat mulai merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi ke sektor pendidikan, media, kesehatan dan teknologi. Masyarakat di tahap ini mengalami keterbukaan terhadap akses menuju kesempatan baru.

5) Tahap 5: masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi

Pada tahap terakhir, masyarakat mulai menikmati konsumsi massal yang tinggi. Tahap ini membuat masyarakat telah sepenuhnya berkembang dengan ditandai oleh pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Barat.

Teori Rostow menjadi salah satu indikator penting bagi negara berkembang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus Indonesia, istilah 'tinggal landas' menjadi salah satu istilah populer untuk menggambarkan proses perkembangan perekonomian Indonesia pada era Orde Baru (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Kemajuan suatu negara lewat teori Rostow dipandang akan tercapai apabila memenuhi aspek ekonomi dan aspek non-ekonomi dalam lembaga politik dan sosial. Gambaran tahap dari Rostow menjadi panduan bagi negara berkembang untuk meniru kemajuan peradaban Barat. Dalam teori Rostow, nilai tradisional yang dihidupi oleh masyarakat dapat dipandang sebagai penghambat kemajuan karena lebih memprioritaskan prinsip subsistensi ketimbang keuntungan perekonomian.

Sebagai produk kapitalisme, ideologi pembangunan menyebabkan negara berkembang jatuh pada ketergantungan terhadap Barat (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Ketergantungan pada

Barat dihasilkan oleh fetisisme komoditas teknologi yang menjadi kebutuhan bagi proses perkembangan perekonomian negara berkembang. Negara berkembang terjebak pada ketergantungan akan teknologi Barat sebagai cara melampaui pola tradisional dan meniru industrialisasi ala Barat, hal ini membutuhkan pemenuhan teknologi terbaru yang didominasi oleh Barat. Ketergantungan pada teknologi Barat dipandang sebagai proyek kolonialisme baru, di mana negara berkembang tidak berdaya melawan hegemoni Barat lewat penerapan ideologi pembangunan (Dirlik, 2014). Vandana Shiva (1997) menyampaikan kritiknya terhadap ketergantungan pada Barat sebagai berikut.

Pembangunan tadinya adalah proyek paska zaman penjajahan, sebuah pilihan model kemajuan bagi seluruh dunia untuk mencapai kemajuan menurut model kemajuan gaya modern Barat, tetapi tanpa harus mengalami ditaklukkan dan dikuras lebih dahulu, seperti yang terjadi pada zaman kolonial.

Meskipun ideologi pembangunan mendapat kritik, penerapan ideologi pembangunan masih menjadi cara populer bagi politisi untuk mendapat dukungan masyarakat. Pada rezim yang otoriter, penerapan ideologi pembangunan adalah bentuk legitimasi kemampuan rezim membangun perekonomian nasional (Arsel dkk, 2021). Pada era orde baru di Indonesia, pemerintahan Soeharto melakukan pembungkaman terhadap oposisi untuk memastikan keberlangsungan praktik ideologi pembangunan (Warburton, 2016). Kini ideologi pembangunan menggunakan cara konservatif dengan cara menghindari topik sensitif dalam politik yang mungkin menghambat perkembangan pembangunan (Warburton, 2016). Dengan menghindari topik sensitif, ideologi pembangunan dapat dipromosikan sebagai cara utama memajukan bangsa.

Maka, dewasa ini permasalahan ideologi pembangunan kembali menjadi relevan pada era *post-truth* yang penuh dengan narasi populis. Sebagai gagasan populis, pembangunan dipandang sebagai solusi utama atas permasalahan sosial (Arsel dkk, 2021). Maka dari itu, segala upaya untuk menghambat pembangunan dapat disingkirkan karena memiliki dampak berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Ideologi pembangunan yang menawarkan kemajuan menjadi daya tarik yang dijual oleh politisi populis sebagai cara mendapatkan dukungan elektoral (Arsel dkk, 2021). Sebagai contoh dalam pidato pada 2016, Presiden Joko Widodo menampilkan tiga kunci untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan: pembangunan infrastruktur, deregulasi dan debirokratisasi (Warburton, 2016). Pidato ini menjelaskan rencana kerjanya yang menampilkan karakter *pro*-masyarakat miskin lewat penerapan pembangunan. Lewat narasi populis semacam ini ideologi pembangunan dapat terus dipromosikan sebagai cara pendorong kemajuan bangsa.

Secara historis ideologi pembangunan adalah produk kapitalisme (Dirlik, 2014). Sebagai produk dari kapitalisme, pembangunan telah menjadi ideologi yang memimpikan modernisasi sebagai bentuk melampaui kehidupan perekonomian tradisional. Dengan tahapan perkembangan perekonomian Rostow, tujuan akhir yang diimpikan adalah terwujudnya masyarakat yang konsumtif. Perilaku konsumtif ini menjadi bentuk fetisisme komoditas yang membenarkan dan mendukung pembangunan (Dirlik, 2014). Maka, pembangunan yang dinilai akan memajukan suatu bangsa bergeser menjadi suatu perlombaan antar negara yang ingin mencapai kemajuan ekonomi layaknya negara Barat. Arif Dirlik (2014) menggambarkan perlombaan ini sebagai berikut.

Pembangunan telah mewujudkan tujuannya, di mana pembangunan kini tiba pada kondisi yang digambarkan sebagai pacuan kuda ekonomi global, di mana para elit penguasa tidak pernah puas membandingkan GDP sebagai cara mengukur pemerintahan yang efektif dan membuktikan kebanggaan bangsa. Keuntungan dan kerugian pembangunan pada masyarakat pada akhirnya dipandang sebagai pertimbangan kecil yang tidak boleh mengganggu jalannya pacuan kuda tersebut.

Sebagai dampak dari promosi ideologi pembangunan, kini pembangunan dipandang sebagai solusi utama atas persoalan sosial di dunia. Pandangan ini menyingkirkan solusi alternatif yang mungkin menjawab persoalan yang sangat kompleks. Kini setelah penerapan ideologi pembangunan yang semakin meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan, pertanyaan yang sama kembali diajukan: apakah pembangunan menghasilkan kesejahteraan atau justru melanggengkan penindasan?

b. Konsep *Epistemicide* Boaventura de Sousa Santos

Teori *epistemicide* Boaventura de Sousa Santos mencoba menampilkan persoalan dalam epistemologi sosial, yakni adanya hegemoni pengetahuan Barat yang berakibat pada pengetahuan *non*-Barat. *Epistemicide* dimaknai oleh Santos sebagai pembunuhan pengetahuan (Santos, 2016). Dalam sejarah dunia, *epistemicide* menjadi persoalan yang berakibat pada hilangnya pengetahuan kelompok yang kalah. Grosfoguel (2013) sebagaimana dikutip oleh Hall dan Tandon (2017) menjelaskan contoh praktik *epistemicide* pada abad ke-16 sebagai berikut.

- 1) Penaklukan Al-Andalus dan pengusiran masyarakat Muslim dan Yahudi dari Eropa.
- 2) Penaklukan masyarakat adat *Indigenous Peoples of the Americas* oleh kolonialisme dan imperialisme Eropa.
- 3) Perdagangan budak untuk menopang perekonomian di Amerika.
- 4) Persekusi perempuan Indo-Eropa yang dituduh sebagai penyihir karena pengetahuan mereka.

Keempat praktik *epistemicide* ini memiliki tujuan untuk menciptakan dominasi militer, ekonomi dan pengetahuan Barat yang dipandang superior. Masyarakat *non*-Barat dipandang sebagai masyarakat yang tidak mampu memahami pengetahuan Barat, cara pandang rasial dan seksis ini membentuk praktik *epistemicide* sebagai cara membungkam pengetahuan dari masyarakat *non*-Barat yang dipandang dibawah pengetahuan Barat. Narasi besar *epistemicide* dilestarikan dalam institusi pendidikan Barat lewat cara universitas Barat membatasi akses pengetahuan dan menciptakan narasi superioritas pengetahuan yang mereka miliki (Hall & Tandon, 2017). Narasi ini pada akhirnya menyebabkan epistemologi Barat atau Global North tidak lagi mampu menawarkan kebaruan pengetahuan.

Epistemologi Global North dipandang Santos tidak mampu mempelajari epistemologi Global South karena ketimpangan relasi kuasa sebagai akibat dari kolonialisme dan imperialisme (Santos, 2016). Praktik kolonialisme dan imperialisme menempatkan epistemologi Global North dalam menara gading yang tidak mampu lagi melihat relevansi antara teori dengan realita yang kompleks. Meskipun hegemoni epistemologi Global North telah mendapat banyak kritik, belum ada alternatif yang cukup kuat untuk melampaui permasalahan ini (Santos, 2016). Maka, akibatnya pada era dewasa ini, hegemoni epistemologi Global North masih mendominasi meskipun kini tidak ada kolonialisme dan imperialisme secara langsung (Santos, 2016). Salah satu contoh adalah gagasan Cartesian tentang alam sebagai *res extensa* yang hingga kini masih mendominasi wacana pengetahuan, di mana posisi alam direduksi sebatas sumber daya, dominasi gagasan ini masih berpengaruh bagi kebijakan publik yang eksploitatif layaknya pola kolonialisme dan imperialisme (Santos, 2016).

Dominasi dari pengetahuan yang eurosentris pada akhirnya gagal mengatasi ketimpangan antara teori dan praktik. Ketimpangan antara teori dan praktik seringkali diakibatkan karena kurangnya pemahaman para akademisi Global North dalam memahami praktik masyarakat Global South (Santos, 2016). Bahkan Santos lebih jauh menyebut adanya kebutaan teori yang mengakibatkan kegagalan memahami praktik, dan praktik yang tidak dijelaskan oleh teori dipahami menjadi praktik yang tidak diakui (Santos, 2016). Santos juga mengkritik penerapan Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang dipandang gagal mengatasi ketimpangan teori dan praktik karena mereka tidak memerhitungkan penindasan kolonialisme, meskipun mayoritas bangsa mengalami penindasan tersebut (Santos, 2016). Pada akhirnya pengetahuan dewasa kini masih tetap didominasi oleh Global North dan masih mengabaikan suara dari Global South.

Sebagai alternatif dari dominasi epistemologi Global North, seringkali para pemikir mencoba menawarkan epistemologi Global South sebagai pengganti dominasi. Namun, harus diperhatikan lebih lanjut sejarah panjang dominasi Global North pada Global South yang mengakibatkan kerusakan pada pengetahuan lokal. Menurut Littletree dan Metoyer (2015) sebagaimana dikutip oleh Patin dkk (2021), pengetahuan lokal telah mengalami devaluasi dan penulisan ulang oleh narasi penguasa, sebagai akibatnya muncullah persepsi bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki otoritas atas pengalaman mereka sendiri. Grosfoguel (2013) dalam Patin dkk (2021) menyatakan bahwa masyarakat yang dilarang berpikir, berdoa dan menghidupi kosmologi dan pengetahuan mereka mengalami penghapusan identitas dan kekuasaan, inilah bentuk pembunuhan epistemologis. Maka, *epistemicide* adalah pengalaman trauma kolektif lintas generasi yang memiliki dampak merusak kebudayaan lewat cara asimilasi menuju ke narasi dominan (Patin dkk, 2021). *Epistemicide* seringkali didasarkan pada niat dan tujuan baik untuk membawa pencerahan kepada kelompok masyarakat, tetapi dalam prosesnya tetap terjadi pengusuran pengetahuan lokal dan masuknya pengetahuan Barat yang mendominasi kehidupan (Patin dkk, 2021).

Pengetahuan dan filsafat ditemukan dalam bahasa sebagai alat dari jiwa manusia (Bennett, 2007). Maka dari itu, pengetahuan lokal dapat ditemukan dari teks penulisan yang menampilkan pengetahuan lokal secara holistik. Keahlian menulis dipandang sebagai bentuk kesenian, bukan sebagai keahlian teknis. Maka, posisi bahasa menjadi sangat penting dalam pembahasan *epistemicide* (Bennett, 2007). Tendensi untuk melakukan normalisasi penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam lingkungan akademik menimbulkan persoalan penerjemahan yang cenderung mengaburkan persoalan (Bennett, 2007). Proses ini menjadi bentuk pembungkaman yang menyebabkan para akademisi harus merubah tafsir untuk mengikuti kaidah kebahasaan Bahasa Inggris (Bennett, 2007). Persoalan ini muncul bukan hanya pada penerapan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama di lingkungan akademik, namun juga muncul dalam praktik kehidupan negara bekas jajahan Eropa yang menggunakan bahasa kolonial sebagai bahasa utama mereka (Santos, 2016). Akibat dari dominasi bahasa kolonial, pengetahuan lokal yang ditulis menggunakan bahasa lokal secara perlahan menghapuskan jejak pengetahuan lokal di masyarakat tersebut (Santos, 2016).

Menurut Santos solusi untuk melampaui hegemoni epistemologi Global North adalah dengan cara pergi belajar kepada Global South (Santos, 2016). Meskipun Global South menawarkan perspektif baru, kita harus memperhatikan perbedaan posisi antara kelompok Imperial South dan anti-imperial South (Santos, 2016). Kelompok Imperial South yang mereproduksi hegemoni epistemologi Global North dalam pengetahuan lokal, cara reproduksi ini diwujudkan dengan penerapan gagasan besar dari Barat dengan bungkus pengetahuan lokal. Sementara kelompok anti-imperial South merujuk pada kelompok yang melestarikan pengetahuan lokal dari upaya pengusuran dalam *epistemicide*. Pada dasarnya, Santos mengajak kita untuk belajar dari epistemologi Global South yang menampilkan perjuangan untuk pengakuan kontribusi pada wacana epistemologi yang adil. Bagi Santos tidak ada keadilan sosial global tanpa adanya keadilan kognitif global (Santos, 2016).

Dewasa ini kolonialisme dan imperialisme tidak lagi menggunakan wajah aslinya, dominasi Barat terhadap negara berkembang diwujudkan dalam kapitalisme global yang memicu meresapnya neoliberalisme di negara berkembang. Kapitalisme masih melanggengkan permasalahan penindasan dan diskriminasi yang lahir dari semangat mengutamakan keuntungan kelompok ketimbang prinsip keadilan sosial. Ilmu pengetahuan modern yang mendapatkan *epistemological privileges* mendorong terobosan teknologi yang semakin memperkuat posisi supremasi Barat atas dunia, teknologi yang sama turut berpengaruh dalam proses pembungkaman ilmu pengetahuan dari kelompok subordinat (Santos, Nunes, & Meneses, 2008). Maka, kehadiran dari epistemologi alternatif dipandang sebagai suatu kebutuhan mendesak. Epistemologi alternatif bukanlah upaya untuk meniadakan dan menolak ilmu pengetahuan (Santos, Nunes, & Meneses, 2008).

Keberagaman budaya *non-Barat* memiliki kekayaan pada pengetahuan, pengalaman dan cara hidup yang tidak bisa direduksi ke dalam konsepsi pengetahuan dan budaya yang eurosentris (Santos, Nunes, & Meneses, 2008). Keberagaman ini menyebabkan proses adopsi pengetahuan eurosentris yang dipandang superior menjadi bentuk dominasi yang mengabaikan keberagaman dan kekayaan pengetahuan lokal. Maka dari itu, dibutuhkan pengakuan kepada epistemologi alternatif yang menampilkan pengetahuan lokal sebagai bentuk pelestarian nilai tradisional yang selama ini diabaikan oleh penerapan epistemologi dominan. Dengan adanya keberagaman epistemologis maka akan dicapai suatu bentuk epistemologi yang menawarkan cara pandang utuh dan objektif yang mampu menjelaskan bagaimana pengetahuan diproduksi dan dihidupi (Santos, Nunes, & Meneses, 2008).

Karl Marx dalam *Theses on Feuerbach* menekankan posisi filsuf yang bukan hanya melakukan interpretasi pada dunia melainkan merubah dunia, posisi ini dikritik oleh Santos dengan mengundang kembali pada proses interpretasi yang adil sebelum melakukan perubahan (Santos, 2018). Lewat proses interpretasi ulang yang adil, maka akan ditemukan adanya epistemologi yang selama ini diabaikan dan tidak diakui. Epistemologi Global South memiliki pandangan bahwa pengetahuan muncul dari perjuangan sosial dan politik, maka pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan tersebut (Santos, 2018). Dalam perjuangan yang diangkat oleh epistemologi Global South, terdapat dua prosedur penting:

1) Ekologi pengetahuan (Santos, 2016)

Ekologi pengetahuan adalah upaya untuk menolak logika monokultur dalam ilmu pengetahuan. Adanya fakta keberagaman budaya menjadikan logika ini tidak dapat dijustifikasi karena melanggengkan pengusuran pengetahuan lainnya. Dalam ekologi pengetahuan, pengakuan pada pengetahuan alternatif bukan menjadi bentuk merusak ilmu pengetahuan yang sudah mapan melainkan sebagai upaya untuk menemukan kembali

keutuhan pengetahuan. Gagasan ini berupaya melampaui logika monokultur dan tuduhan bahwa pengetahuan alternatif adalah pengetahuan yang tidak ilmiah.

2) Penerjemahan lintas budaya (Santos, 2016)

Penerjemahan lintas budaya adalah upaya untuk menjembatani epistemologi Global North dan Global South agar bisa menemukan keutuhan pengetahuan. Penerjemahan lintas budaya terdiri dari upaya mencari kesamaan dan perbedaan, hasil ini kemudian digunakan untuk membangun pemahaman baru yang memperkuat solidaritas terhadap gagasan keadilan kognitif. Hasil dari penerjemahan lintas budaya memungkinkan diterimanya gagasan keberagaman dan menghubungkan antara teori dengan realita yang kompleks.

Bagi Santos, epistemologi Global South suatu saat akan tidak dibutuhkan lagi, hal ini akan tercapai apabila hegemoni epistemologi Barat sudah hilang dan digantikan dengan epistemologi yang utuh dan mengedepankan keberagaman (Santos, 2018). Perjuangan untuk menciptakan epistemologi yang utuh menjadi perjuangan yang tidak mudah karena harus melampaui kerusakan dari *epistemicide* yang masih terus dilakukan. Proses untuk melampaui kerusakan *epistemicide* masih sulit dicapai karena dominasi kapitalisme yang terus menggusur pengetahuan lokal untuk kepentingan kapital. Meskipun sulit, gagasan dari Santos menjadi cara pandang yang menampilkan bahaya dari perusakan pengetahuan dan bagaimana kita bisa melampaui permasalahan ini.

c. Manifestasi Gagasan *Epistemicide* Boaventura de Sousa Santos

Ideologi pembangunan sebagai produk dari kapitalisme memiliki prioritas pada pertumbuhan ekonomi. Maka, dalam ideologi pembangunan dewasa ini, ada kecenderungan untuk menyusun strategi pembangunan yang didukung oleh intervensi negara untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan berjalan lancar (Warburton, 2018). Intervensi negara seringkali ditujukan untuk mempermudah perizinan dan birokrasi agar investor dapat memberikan investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ideologi pembangunan sudah sangat mapan dan sangat sulit untuk ditinggalkan, posisi ini menjadi wujud hegemoni epistemologi Barat atau Global North terhadap negara berkembang atau Global South.

Persoalan ontologis dari ideologi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang menjadi panglima tertinggi, hal ini muncul dari cara justifikasi ideologi pembangunan sebatas lewat tolak ukur manfaat ekonomi (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Dengan justifikasi ini, ideologi pembangunan merubah alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk mewujudkan peradaban modern ala Barat (Shiva, 1997). Ketika pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas maka GNP menjadi indikator utama, meskipun penggunaan GNP mendapat kritik karena hanya mengukur dampak ekonomi dan mengabaikan persoalan kerusakan lingkungan dan eksploitasi yang menghasilkan kerugian lebih parah (Shiva, 1997). Meskipun saat ini narasi pembangunan berkelanjutan ditampilkan sebagai upaya memperbaiki kerusakan lingkungan, narasi ini dipandang belum menyelesaikan permasalahan jangka panjang dari kerusakan lingkungan akibat pembangunan (Dirlik, 2014).

Akibat dari penempatan ekonomi sebagai prioritas, ideologi pembangunan menempatkan pengetahuan lokal yang mengedepankan prinsip keberlanjutan sebagai pengetahuan yang dapat diabaikan. Maka, pemikiran Rostow yang menjadi pondasi bagi berkembangnya teori modernisasi dan ideologi pembangunan dapat dipandang sebagai bentuk *epistemicide* modern. *Epistemicide* yang dilakukan tidak didahului dengan invasi militer seperti pada *epistemicide* di abad ke-16 (Hall & Tandon, 2017). *Epistemicide* yang terjadi dalam penerapan teori Rostow adalah pada proses mendorong masyarakat meninggalkan tahap tradisional menuju tahap yang dipandang lebih modern (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Cara pandang masyarakat tradisional bahkan dijabarkan oleh Inkeles dan Smith (1974) sebagai masyarakat yang terjebak (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Akibat dari cara pandang yang reduksionis ini adalah ketidakadilan epistemis, pengetahuan dan kehidupan masyarakat tradisional dipandang sebagai gagasan yang harus ditinggalkan karena sudah tidak lagi relevan. Pada akhirnya, masyarakat yang meninggalkan pengetahuan mereka masuk dalam jebakan kapitalisme, *epistemicide* yang dipandang mampu melakukan emansipasi justru mewujudkan penindasan baru.

Ideologi pembangunan memiliki *epistemological privilege* yang menyebabkan wacana ini menjadi cara menyelamatkan negara berkembang dengan cara yang ditentukan oleh Barat (Santos, 2016). Akibat dari kuatnya posisi ideologi pembangunan dalam epistemologi Global North, penerapan ideologi pembangunan di Global South menyebabkan terjadinya *epistemicide* pada pengetahuan lokal yang bertentangan dengan gagasan ideologi pembangunan. Dampak dari *epistemicide* akibat ideologi pembangunan adalah ketergantungan negara berkembang pada teknologi dan pengetahuan Barat (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Global North yang memproduksi

teknologi menjual produk teknologi mereka sebagai satu-satunya cara untuk mendukung penerapan pembangunan di Global South. Teknologi alternatif yang dimiliki dan dilestarikan dalam epistemologi Global South masuk ke dalam kategori teknologi terbelakang yang harus digantikan oleh teknologi terbaru dari Barat (Abdoellah & Mulyanto, 2019).

Ketergantungan yang muncul akibat *epistemicide* dari ideologi pembangunan tidak dibatasi pada ketergantungan teknologi, ketergantungan ekonomi turut menjadi permasalahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Global South. Ideologi pembangunan yang sering dipromosikan dengan narasi populis menciptakan pertandingan antar negara untuk meningkatkan GDP lewat pembangunan (Dirlik, 2014). Bangkitnya populisme di banyak negara mendorong peneguhan narasi pembangunan sebagai wujud proyek mercusuar nasional. Persoalan akan menjadi semakin parah ketika ambisi pembangunan jauh lebih besar dibanding dengan kemampuan perekonomian negara untuk melakukan eksekusi proyek pembangunan (Warburton, 2018). Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa ideologi pembangunan pada akhirnya hanya menciptakan fetisisme pada komoditas (Dirlik, 2014). Setelah penerapan ideologi pembangunan yang menghasilkan *epistemicide* pada pengetahuan lokal di Global South, masyarakat di negara berkembang hanya menjadi masyarakat konsumtif yang tergantung pada komoditas dari Global North.

Epistemicide yang terjadi akibat ideologi pembangunan menyebabkan tersingkirnya kelompok subordinat yang memiliki pengetahuan yang tidak sejalan dengan wacana pembangunan. Penggusuran pada pengetahuan dan kehidupan kelompok subordinat menunjukkan karakter pembangunan yang melanggengkan eksploitasi dan penindasan (Dirlik, 2014). Cara penggusuran semacam ini menunjukkan ketimpangan epistemis dari epistemologi Global North yang gagal memahami praktik masyarakat Global South (Santos, 2016). Ketimpangan ini menyebabkan teori modernisasi dalam ideologi pembangunan menjadi teori yang buta karena tidak memahami dan tidak mengakui keberagaman pengetahuan di Global South. Akibat dari ketimpangan ini adalah kebijakan yang tidak adil yang membenarkan penggusuran kehidupan dan pengetahuan masyarakat (Santos, 2016). Pada akhirnya, ketimpangan epistemis ini akan menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Untuk mengatasi kerusakan dari *epistemicide* akibat ideologi pembangunan, teori Santos menawarkan strategi baru yang berupaya memperbaiki kerusakan dan melampaui kegagalan upaya sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan teori Santos, *epistemicide* hanya bisa dilampaui dengan cara adanya pengakuan terhadap dominasi yang terjadi dari dominasi Global North terhadap Global South. Pengetahuan lokal dari masyarakat Global South telah ditulis ulang sesuai dengan narasi penguasa yang berorientasi pada kepentingan Global North, akibatnya masyarakat Global South tidak lagi memiliki otoritas atas pengalaman mereka sendiri (Patin dkk, 2021). Dengan adanya pengakuan pada dominasi, Santos memandang kegagalan Teori Kritis dan kritik dari Global North dapat melampaui kegagalan mereka memahami rumitnya realita pengalaman yang dialami oleh masyarakat Global South (Santos, 2016). Meskipun ideologi pembangunan membawa narasi baik untuk memajukan masyarakat negara berkembang, ideologi pengetahuan harus diakui sebagai bentuk dominasi baru yang turut melanggengkan praktik *epistemicide*. Pengakuan akan dominasi ini menjadi bentuk upaya baru untuk menjembatani dan membuka dialog antara Global North dan Global South.

Santos memandang bahwa tidak ada keadilan sosial tanpa adanya keadilan kognitif global (Santos, 2016). Dengan menggunakan prinsip ini, maka Santos memandang *epistemicide* dapat dilampaui apabila Global North belajar dari Global South (Santos, 2016). Global South yang dituju adalah kelompok anti-imperial South yang melestarikan pengetahuan lokal dari gempuran *epistemicide* ideologi pembangunan. Hal ini berbeda dari kelompok Imperial South yang justru menerima dan mendukung ideologi pembangunan. Dengan adanya upaya Global North belajar dari anti-imperial Global South, akan ditemukan pemahaman baru yang lebih sempurna untuk dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk mengatasi dan mencegah *epistemicide*. Pertemuan antara Global North dan Global South tidak ditujukan untuk menggantikan dominasi Global North dengan Global South atau sebaliknya, pertemuan ini ditujukan untuk menemukan epistemologi alternatif yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan baru yang lebih mengedepankan kemanusiaan ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Prosedur pertama Santos terkait ekologi pengetahuan Santos memandang pentingnya penolakan logika monokultur dalam ilmu pengetahuan (Santos, 2016). Keberagaman budaya *non-Barat* yang memiliki keberagaman pengetahuan lokal tidak bisa direduksi dalam kerangka epistemologis yang eurosentris (Santos, Nunes, & Meneses, 2008). Upaya reduksi ke dalam satu kerangka tunggal memiliki dampak berbahaya yang akan berujung pada *epistemicide*. Maka dari

itu, dibutuhkan pengakuan kepada keberagaman epistemologi yang memiliki keberagaman perspektif untuk menyikapi ideologi pembangunan dan bagaimana cara membangun bangsa dengan tetap memperhatikan seluruh aspek. Upaya melampaui logika monokultur tidak merusak ilmu pengetahuan, upaya ini akan merusak *epistemicide* dan bentuk dominasi dan menggantikannya dengan pemahaman baru yang lebih adil. Dalam penerapan ideologi pembangunan, prosedur ekologi pengetahuan akan menjadi cara untuk melakukan kritik terhadap dasar ontologis ideologi pembangunan yang didominasi oleh faktor perkembangan ekonomi. Selain kritik terhadap dasar ontologis, ekologi pengetahuan juga memberikan kontribusi dengan cara menawarkan perspektif baru tentang pentingnya faktor selain perkembangan ekonomi.

Untuk bisa mewujudkan prosedur pertama, dibutuhkan tindak lanjut dalam prosedur kedua, yaitu penerjemahan lintas budaya (Santos, 2016). Penerjemahan lintas budaya diperlukan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dari epistemologi Global North dan Global South. Hal ini hanya akan terjadi apabila prosedur pertama yang menekankan pengakuan keberagaman telah dijalankan. Lewat penerapan penerjemahan lintas budaya, hasil temuan akan menjadi pondasi bagi pembangunan pemahaman baru yang memperkuat solidaritas global terhadap gagasan keadilan kognitif. Dengan pemahaman baru ini, persoalan ketimpangan epistemis dalam epistemologi Global North yang gagal menjembatani realita dan teori dapat dilampaui. Dalam penerapan ideologi pembangunan, penerjemahan lintas budaya dapat mendorong pemahaman baru tentang ketimpangan yang dihasilkan oleh ideologi pembangunan. Penerjemahan lintas budaya akan menampilkan kritik dan saran pada ideologi pembangunan yang memiliki ketimpangan antara teori dan praktik di lapangan, selain itu persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi pemahaman baru yang hanya bisa ditemukan lewat penerjemahan lintas budaya.

Dengan menggunakan perspektif teori *epistemicide* Santos, ideologi pembangunan dapat dipandang sebagai bentuk *epistemicide* yang menggusur pengetahuan lokal. Hegemoni dari ideologi pembangunan yang sangat kuat mendominasi pada akhirnya membutuhkan strategi baru untuk mengatasi persoalan *epistemicide* dalam pembangunan. Santos menawarkan kritik terhadap penerapan *epistemicide* sekaligus menawarkan solusi yang berusaha menjembatani dua kelompok besar Global North dan Global South. Tawaran dari Santos masih menjadi gagasan yang sulit diterapkan karena besarnya pengaruh ideologi pembangunan yang kini ditopang oleh narasi populis, meskipun demikian tawaran ini memiliki kelebihan dengan cara mengajukan dua prosedur yang dapat menjembatani perbedaan Global North dan Global South. Dengan penerapan prosedur yang ditawarkan oleh Santos, akan ditemukan epistemologi alternatif yang menampilkan keutuhan cara pandang.

4. Kesimpulan

Dominasi dari ideologi pembangunan telah cukup lama meresap ke dalam kehidupan masyarakat global. Sebagai sebuah ideologi yang dibangun dari pengetahuan Barat, ideologi pembangunan dapat dipandang sebagai bentuk dominasi baru dari negara Barat kepada negara berkembang pasca Perang Dunia II. Dalam penerapan ideologi pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas yang diutamakan. Akibat dari prioritas pada pertumbuhan ekonomi, ideologi pembangunan cenderung menggusur pengetahuan lokal yang mengandung gagasan yang mengkritik ideologi pembangunan.

Dengan menggunakan teori *epistemicide* Boaventura de Sousa Santos, pengusuran pengetahuan lokal oleh ideologi pembangunan adalah bentuk *epistemicide* modern. Pengusuran pengetahuan lokal ini pada akhirnya akan menyebabkan masyarakat tercabut dari kehidupan mereka, kondisi ini akan menyebabkan ketergantungan kepada Barat. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan dan penindasan dari *epistemicide* akibat ideologi pembangunan, Boaventura de Sousa Santos menawarkan dua prosedur: ekologi pengetahuan dan penerjemahan lintas budaya. Kedua prosedur ini memiliki dasar pada pengakuan akan adanya dominasi dan pentingnya penghargaan pada keberagaman pengetahuan.

Kedua prosedur yang ditawarkan oleh Boaventura de Sousa Santos adalah cara untuk melampaui kerusakan yang terjadi dari *epistemicide* akibat ideologi pembangunan. Cara ini menjadi upaya yang sulit karena ideologi pembangunan kini terus dipromosikan dalam narasi populis sebagai cara untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat. Meskipun demikian, prosedur dari Boaventura de Sousa Santos meletakkan pondasi untuk menjembatani perbedaan antara epistemologi Global North dan Global South dan menyusun epistemologi alternatif yang dapat menawarkan gagasan baru yang melampaui ideologi pembangunan. Dengan epistemologi alternatif ini, Boaventura de Sousa Santos mendorong terciptanya

pemahaman baru yang lebih menampilkan keutuhan realita terhadap permasalahan ideologi pembangunan.

5. Daftar Pustaka

- Abdoellah, O., & Mulyanto, D. (2019). *Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Arsel, M., Adaman, F., & Saad-Filho, A. (2021). Authoritarian Developmentalism: The Latest Stage of Neoliberalism? *Geoforum*, 261-266.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Bennett, K. (2007). Epistemicide! The Tale of Predatory Discourse. *The Translator*, 151-169.
- Dirlik, A. (2014). Developmentalism: A Critique. *Interventions*, 30-48.
- Hall, B. L., & Tandon, R. (2017). Decolonization of Knowledge, Epistemicide, Participatory Research and Higher Education. *Research for All*, 6-19.
- Patin, B., Sebastian, M., Yeon, J., Bertolini, D., & Grimm, A. (2021). Interrupting Epistemicide: A Practical Framework for Naming, Identifying, and Ending Epistemic Injustice in the Information Professions. *Journal of Association Information Science Technology*, 1-13.
- Santos, B. (2016). *Epistemologies of The South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.
- Santos, B. (2018). *The End of The Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of The South*. Duke University Press.
- Santos, B., Nunes, J. A., & Meneses, M. P. (2008). Introduction: Opening Up the Canon of Knowledge and Recognition of Difference. Dalam B. Santos (Penyunt.), *Another Knowledge is Possible: Beyond Northern Epistemologies* (hal. xix-lxii). Verso.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Buku Obor.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 297-320.
- Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? *Journal of Southeast Asian Economies*, 355-368.